

Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan

Yeni Yusnita*, Rumzi Samin, Rudi Subiyakto

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

*yusnitayeni90@yahoo.com

Abstract

Tourism has become an important source of local income in Bintan Regency. However, the implementation of tourism management policies in Bintan Regency still faces problems, both factual and theoretical, from various stakeholders. This research aims to analyze the implementation of policy using Edward III theory in managing tourism in Bintan Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach by collecting secondary data in the form of government documents and primary data through direct interviews with informants, which were then analyzed deeply according to the findings on the ground. This study shows that the implementation of tourism management policies in Bintan Regency requires strong collaboration between the government, community, and relevant parties. Edward III emphasizes that structural variables, attitudes or dispositions of implementers, resources, and communication must be accompanied by the principle of building sustainable tourism villages, so that the problems that will be faced can be solved optimally. The barriers and challenges in implementing this policy must be overcome by every stakeholder. The government needs to focus more on developing local potential and increasing community capacity in managing tourism villages. In addition, the government also needs to provide training and mentoring to the community so that they can actively participate in managing tourism villages. Furthermore, the implementation of tourism management policies in Bintan Regency requires a strong commitment from the government, community, and relevant parties to increase community awareness and improve the quality of tourism village management. Therefore, it is hoped that successful tourism village management can be achieved in Bintan Regency that is ideal and sustainable.

Keywords: *Implementation; Policy; Tourism Village*

Abstrak

Desa wisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan lokal yang penting di Kabupaten Bintan. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan masih menghadapi permasalahan baik secara faktual masalah maupun masalah teoritis oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen pemerintah dan data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan temuan fenomena di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Edward III menekankan pada struktur birokrasi, sikap atau disposisi pelaksana, sumber daya serta komunikasi harus disertai dengan prinsip membangun Desa Wisata yang berkelanjutan sehingga permasalahan yang akan dihadapi bisa diselesaikan dengan optimal. Hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan ini harus bisa diatasi oleh

setiap pemangku kepentingan, pemerintah perlu lebih fokus pada pengembangan potensi lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kesuksesan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan yang ideal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Desa Wisata

Pendahuluan

Dunia pariwisata saat ini memiliki tren baru yaitu desa. Desa wisata didefinisikan sebagai kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu untuk menjadi destinasi wisata. Desa wisata memiliki daya tarik wisata tersendiri yaitu kondisi fisik lingkungan pedesaan serta kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat (Zebua, 2016). Dalam sebuah kemajuan pariwisata di suatu daerah, tentunya harus melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus aktif terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya.

Pengelolaan desa wisata sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat setempat dengan kearifan masyarakat setempat, sehingga menjadi salah satu kekuatan pendorong untuk kegiatan pariwisata dan menambah nilai bagi wisatawan yang mengunjungi desa wisata (Purwanti, 2019). Pembangunan kepariwisataan khususnya desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman (Chin, 1995; Sesotyanyingtyas & Manaf, 2015). Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada kesejahteraan masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek (Sentanu & Mahadiansar, 2020; Syah, 2017).

Desa wisata adalah wisata yang terdiri dari seluruh pengalaman pedesaan, wisata alam, tradisi dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan secara keseluruhan melalui suasana yang ditawarkan (Antara & Arida, 2015; Muzwardi & Simbolon, 2024). Perkembangan desa wisata semakin jelas ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dampaknya terjadi peningkatan jumlah desa wisata yang signifikan di seluruh Indonesia sejak tahun 2014 (Purwanti, 2019; Widnyani, 2022). Guna mewujudkan desa wisata diperlukan perangkat regulasi atau norma sebagai aspek legalitas dan yuridis formal. Dengan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, desa wisata diharapkan dapat beraktivitas tanpa ada gangguan misalnya keberatan dari pihak-pihak lain (Nofiyanti et al., 2018).

Terbentuknya regulasi terkait desa wisata juga dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan desa wisata itu sendiri sehingga dapat dikelola secara profesional. Pengelolaan Desa Wisata secara profesional, akan memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelestarian sumber daya dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Irhandayaningsih, 2019). Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa daerah yang menjadi tujuan wisata berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat Daerah Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Kabupaten Bintan yaitu kawasan Wisata Internasional Lagoi, Kawasan Wisata Pantai Trikora, kawasan Wisata Gunung Bintan dan kawasan Wisata

Sungai Lepah. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi harapan baru bagi desa untuk pemerataan ekonomi. Harapan itu salah-satunya ialah bahwa desa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. Undang-Undang mengamanatkan setiap desa ke depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan menjalankan usaha-usaha yang bersifat produktif, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan memakmurkan desa.

Sehingga menjadi kesempatan bagi desa untuk mempercepat pembangunan desa, adapun usaha yang dikelola BUMDesa adalah usaha yang bersumber dari potensi alam yang dimiliki setiap desa. Desa yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pariwisata dan memiliki komunitas masyarakat yang mampu menggali potensi lokal bisa mengembangkan desa wisata (Gurvantry et al., 2022; Raharjana, 2010). Pemangku Kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi Pemangku Kepentingan yang terlibat berdampak signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi (Rachman et al., 2021). Dalam hal ini adalah meningkatkan pengembangan wisata desa, Pemangku Kepentingan masing-masing memiliki peran dalam program yang berhasil menjadi penting dan krusial (Dwivedi, 2021; Rahma & Primasworo, 2018).

Pengembangan desa wisata melibatkan berbagai peran Pemangku Kepentingan. Peran adalah abstraksi dari perilaku suatu obyek yang terdiri dari bagian-bagian interaksi dari obyek tersebut Bersama-sama dengan serangkaian kendala yang mungkin terjadi (Genilloud & Wegmann, 2000). Salah satu penguatan nasional yang diawali penguatan suatu daerah dapat diwujudkan salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata (Setiawan, 2016). Pengembangan sektor pariwisata dalam prosesnya melibatkan banyak Pemangku Kepentingan sebagai bentuk industri multisektoral (Arfandi & Adhayanto, 2017). Dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata (Gautama et al., 2020).

Peran masyarakat yang dilibatkan pada Desa Wisata sebagai pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor kunci dan menempatkannya dalam konteks paradigma baru untuk pembangunan berkelanjutan (Kedang & Soesilo, 2021). Melalui peran kelembagaan didirikan lembaga desa yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa serta mewujudkan sapta pesona, adapun POKDARWIS yang ada di Desa Wisata Kabupaten Bintan yang saat ini tetap eksis yaitu:

Tabel 1. POKDARWIS pada Desa Wisata di Kabupaten Bintan

No	Nama POKDARWIS	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Desa Wisata Pesona E kang	Taman Rekreasi	Desa E kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong
2.	Desa Wisata Sumpat	Mangrove Tour	Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong
3.	Desa Wisata Mutiara Bhine kka	Kampung Tour	Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong
4.	Desa Wisata Mancing Berakit	Memancing	Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong
5.	Eco Wisata Tosela	Mangrove, Rekreasi	Desa Toapaya Selatan Kp. Simpangan Km 16

No	Nama POKDARWIS	Jenis Kegiatan	Lokasi
6.	Perisai Mapur	Bahari	Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir

Sumber : DISBUDPAR Bintan, 2021.

Pelaksanaan BUMDesa di Kabupaten Bintan telah diterapkan sejak 2016, dalam pembentukan BUMDesa pertama dibentuknya secara administrasi dibuatnya anggaran rumah tangga yang berdasarkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di mana setiap desa harus mempunyai BUMDesa. BUMDesa merupakan salah satu aktor yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan desa wisata. Di Provinsi Kepulauan Riau BUMDesa yang bergerak pada bidang pariwisata terbanyak berada di Kabupaten Bintan sehingga menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Bintan memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya melalui BUMDesa.

Salah satu contoh pengelolaan Desa Wisata yang berhasil yaitu Desa Wisata Ekang Anculai di Kabupaten Bintan menjadi percontohan desa wisata di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMPARAKRAF). Penetapan itu dilakukan karena Desa Wisata Ekang Anculai dikelola oleh masyarakat sekitar dengan menerapkan kearifan lokal. Desa Wisata Ekang Anculai dibangun di lokasi kebun karet yang sudah tidak produksi.



Gambar 1. Jumlah BUMDesa di sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Sumber : Milyawati, 2021

Penginapan yang tersedia di sekitar desa dibangun dari bambu dengan berbagai fasilitas untuk pengunjung/wisatawan, seperti berkuda dan agrowisata. MENPAREKRAF, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan akan merencanakan Desa Ekang Anculai adalah *prototipe* desa wisata (Fathur, 2021). Diharapkan Desa Wisata Ekang Anculai menjadi *prototipe* yang dapat di replikasi oleh sejumlah daerah lainnya. Sebab, melalui kearifan lokal yang melibatkan masyarakat, desa wisata yang dikelola warga desa dan pemuda, karang taruna serta POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) itu berkembang pesat sehingga potensi dalam mengelola desa wisata bisa di optimalkan.

Lokasinya yang berupa perbukitan dengan hutan karet serta danau dinilainya sangat indah. Selain keindahan alam, infrastruktur, atau fasilitas yang ditawarkan, hal lain yang membuat Desa Wisata Ekang Anculai menjadi desa wisata terbaik adalah kolaborasi yang ada. Pola kolaborasi desa wisata yang dilakukan dengan melibatkan pemuda selaku pengelola dengan masyarakat setempat yang berjumlah sebanyak 800 kepala keluarga (Ramadhian, 2021). Dalam pengembangan Desa Wisata perlu dipastikan partisipasi publik pada pengelolaan desa wisata. Partisipasi publik melekat secara kuat pada pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Kesadaran perlunya partisipasi publik didasarkan atas perhatian para pengambil kebijakan akan kebutuhan untuk memahami para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang diambil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan Kepada Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa berkewajiban mengelola potensi wisata di wilayahnya, sehingga menjadi langkah awal pengembangan desa wisata di Kabupaten Bintan sebagai upaya pengelolaan desa wisata yang mandiri.

Saat ini Pengembangan desa wisata di daerah tersebut terhambat disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat hal ini dapat dilihat masyarakat tempatan masih belum mampu menjaga fasilitas wisata alam yang ada, hal ini menjadi kendala dalam pengembangan kawasan wisata di daerah tersebut. Kurangnya dukungan dari pemerintah seperti banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata (Arifin, 2017).

Desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadikan obyek wisata sebagai ciri khasnya seperti keasrian dan keindahan alam, seni budaya dan kebiasaan masyarakat sehari-hari sehingga wisatawan bisa merasakan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Kabupaten Bintan sudah dikenal sejak lama sebagai wilayah yang fokus dalam pengembangan pariwisata baik internasional maupun lokal, termasuk dalam pengembang pariwisata alternatif seperti desa wisata. Ciri dari desa wisata yaitu masyarakat merupakan pelaku utama pengembangan potensi kepariwisataan di wilayahnya sehingga dapat berkembang secara mandiri. Beberapa aspek yang menunjukkan keaslian desa wisata sebagai daerah yang memiliki aspek sosial budaya, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa, adat istiadat dan kegiatan sehari-hari masyarakat desa, serta integrasi komponen pariwisata lainnya antara lain akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung (Middleton & Hawkins, 1998; Mukhirto et al., 2022; Okparizan et al., 2019).

Gejala atau permasalahan penelitian implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta kesuksesan pembangunan desa wisata. Pertama, ada kesulitan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah nasional dalam membentuk atau mengatur strategi pengelolaan desa wisata yang efektif. Kedua, peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata terbatas, walaupun mereka yang terdampak langsung dari kegiatan wisata dan memiliki pengalaman unik dalam memahami kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa wisata. Ketiga, adanya konflik antara pengembangan wisata dan pemantauan lingkungan yang baik, sehingga menimbulkan tuntutan lingkungan yang semakin tinggi dari masyarakat global. Keempat, kekurangan sumber daya dan fasilitas infrastruktur yang cukup dalam pengelolaan desa wisata, yang memerlukan investasi dan pengembangan yang signifikan untuk memenuhi tuntutan wisatawan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa wisata. Lalu, pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks pada pengembangan dan pengelolaan desa wisata, yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan solusi yang lebih inovatif untuk menghadapi masalah tersebut.

Dalam rangka menghadirkan solusi yang efektif dan membantu masyarakat desa wisata di Kabupaten Bintan, penelitian implementasi kebijakan harus memperhatikan gejala-gejala ini dan menghadirkan solusi yang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, menjaga lingkungan, dan memperbaiki pengelolaan desa wisata secara integratif. Dalam menganalisis kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan, maka penting memperhatikan dan mengatasi berbagai Teoritical problem yang mungkin timbul, serta menyusun strategi yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kabupaten Bintan. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data deskriptif tentang situasi dan kondisi di lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, mulai dari pembiasaan, identifikasi tema dan pola, hingga penafsiran temuan berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis. Peneliti juga melakukan triangulasi, member check, dan peer review untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi, studi kasus, dan analisis tematik. Peneliti akan menggunakan berbagai cara untuk menyajikan temuannya, seperti menggunakan kutipan dan contoh untuk mengilustrasikan tema. Dalam penyajian data, peneliti harus mempertimbangkan ketelitian dan transparansi, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kedalaman dan keluasan analisis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam membuat keputusan terkait pengelolaan desa wisata.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Umum Pengelolaan Wisata di Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan, sebagai daerah yang sangat strategis letaknya, yakni berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, dan juga dikenal sebagai pulau yang menyimpan berbagai ragam daya tarik wilayah perairan pantai dan laut. Bintan memang diproyeksikan sebagai pulau wisata dan peristirahatan karena banyak mempunyai kawasan pantai indah yang telah dihiasi dengan berbagai fasilitas berkelas mewah dan kebanyakan berada di sepanjang pantai utara pulau ini atau tepatnya di daerah Lagoi yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Tempat wisata yang telah dikembangkan di Lagoi adalah Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif Lagoi (Bintan Resort), Pantai Sebong Perih, dan Desa wisata Sebong Perih yang menawarkan wisata bahari. Pulau Bintan tidak hanya terkenal dengan Lagoi nya, tetapi tempat wisata lain mulai dari wisata alam, wisata ekologi, wisata budaya, serta wisata sejarah. Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora dan perkampungan Nelayan Kawal, pantai-pantai di Pulau Kecil di Sekitar Pulau Bintan, dan Bintan Leisure Park, serta Air Terjun Gunung Bintan, Goa Gunung Bintan, dan Danau Bekas Galian Bauksit Alam Tirta di kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.

Selain itu tempat wisata tersebut tak kalah cantik dengan kawasan Lagoi. Juga terdapat penanaman pohon di hutan bakau sepanjang pantai timur Pulau Bintan dan hutan lindung di Gunung Kijang dan Bukit Kucing. Selain itu Bintan juga dengan rutin menyelenggarakan Event internasional. Khususnya Event olahraga internasional. Beberapa di antaranya adalah Festival Layang-Layang, Lomba Lari Triathlon Internasional “Meta Man”, Kejuaraan Golf Internasional, dan Tour De Bintan, dll.



Gambar 2. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata Kabupaten Bintan
Sumber: RIPPARDA Kabupaten Bintan

Maka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan, pemerintah setempat telah mengembangkan berbagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda-beda. Salah satu contoh adalah Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif Lagoi (Bintan Resort), yang menawarkan wisata bahari dan fasilitas mewah di sepanjang pantai utara pulau ini. Selain itu, juga terdapat desa wisata Sebong Perih yang menawarkan wisata budaya dan ekologi.

Tidak hanya kawasan Lagoi, Pulau Bintan juga memiliki berbagai tempat wisata lainnya yang tak kalah menarik, seperti Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan perkampungan Nelayan Kawal. Pulau Kecil di Sekitar Pulau Bintan juga menawarkan pengalaman wisata alam yang unik. Selain itu, terdapat juga Bintan Leisure Park, Air Terjun Gunung Bintan, Goa Gunung Bintan, dan Danau Bekas Galian Bauksit Alam Tirta yang menawarkan pengalaman wisata sejarah dan alam. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata, pemerintah setempat juga telah berupaya untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di hutan bakau sepanjang pantai timur Pulau Bintan dan hutan lindung di Gunung Kijang dan Bukit Kucing. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari polusi sehingga kualitas pengelolaan tersebut sangat baik diimplementasikan.

Selain itu, pemerintah setempat juga telah mengadakan berbagai Event internasional, seperti Festival Layang-Layang, Lomba Lari Triathlon Internasional “Meta Man”, Kejuaraan Golf Internasional, dan Tour De Bintan dll. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan popularitas Kabupaten Bintan sebagai destinasi wisata dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya ekonomi yang berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan wisata, pemerintah setempat harus terus meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur wisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan stakeholders lainnya, seperti industri pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat dasar Desa Wisata maka merujuk pada Keputusan Bupati Bintan Nomor : 158/II/2023 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Bintan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Penetapan Desa Wisata Kabupaten Bintan 2023

No	Nama Desa	Lokasi	Potensi	Kategori
1	Desa Wisata E kang	Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong	Ekowisata	Berkembang
2	Desa Wisata Pengudang Sumpat	Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong	Ekowisata	Rintisan
3	Desa Wisata Sebong Lagoi	Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong	Ekowisata	Rintisan
4	Desa Wisata Berakit	Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong	Wisata Budaya	Rintisan
5	Eko Wisata Tosela	Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	Ekowisata	Rintisan
6	Perisai Mapur	Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam	Kuliner	Rintisan
7	Desa Wisata Busung	Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam	Ekowisata	Rintisan

Sumber: Peraturan Bupati Bintan, Data Sekunder 2024

Pada tahun 2023, Bupati Bintan telah menetapkan beberapa desa sebagai desa wisata melalui Keputusan Bupati Bintan Nomor 158/II/2023. Dalam penetapan ini, terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk menentukan desa wisata yang akan dipilih, yaitu ekowisata dan wisata budaya. Ekowisata adalah kategori yang digunakan untuk menentukan desa wisata yang memiliki potensi keekonomian yang tinggi dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dalam tabel 2, terlihat bahwa beberapa desa telah ditetapkan sebagai desa wisata dengan kategori ekowisata, seperti Desa Wisata E kang, Desa Wisata Pengudang Sumpat, dan Desa Wisata Sebong Lagoi. Selain itu, terdapat juga desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata dengan kategori wisata budaya, seperti Desa Wisata Berakit.

Analisis dari penetapan desa wisata di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan telah memperhatikan potensi keekonomian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing desa. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan berencana untuk meningkatkan kualitas pariwisata di daerah tersebut dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

2. Implementasi Kebijakan Edward III dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan

Implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata berarti memastikan bahwa desa wisata dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat setempat, pengunjung, serta lingkungan. Kebijakan ini harus didasarkan pada analisis kekuatan dan kelemahan desa wisata, serta keterkaitan dengan tujuan pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dan masyarakat setempat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi wisata yang ada,

meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan wisata yang berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka hasil dan pembahasan dari penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan Edward III yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Dalam pengelolaan desa wisata, struktur birokrasi sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan efisiensi dalam pengelolaan objek wisata. Dalam Kabupaten Bintan, birokrasi pengelolaan desa wisata terdiri dari beberapa level dan elemen yang saling terkait. Dalam struktur birokrasi pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan, setiap elemen birokrasi memiliki perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, struktur birokrasi pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan efisiensi dalam pengelolaan objek wisata. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan Desa Wisata mempunyai tahapan yang berjenjang di Kabupaten Bintan, hal ini disampaikan Kabid Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan oleh Santi Rosalinda penuturannya menyatakan

Pastinya dengan melibatkan masyarakat yang ada sebagai anggota desa wisata. Sebelum terbentuknya desa wisata itu kan diwajibkan menentukan kelompok sadar wisata desa wisata (POKDARWIS). Di dalam POKDARWIS ini terdiri dari beberapa potensi wisata yang dimiliki oleh setiap desa tersebut. Setelah terbentuknya struktur POKDARWIS maka di bentuklah struktur desa wisata. SK POKDARWIS dan desa wisata itu di keluarkan oleh pemda setempat, untuk SK desa wisata di teruskan ke bupati melalui dinas pariwisata dan SK desa wisata tersebut akan di keluarkan oleh bupati (wawancara, 29 April 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan menunjukkan adanya kebijakan yang berjenjang. Kebijakan ini dimulai dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata (POKDARWIS) yang terdiri dari beberapa potensi wisata yang dimiliki oleh setiap desa. Kemudian, SK POKDARWIS dan SK Desa Wisata di keluarkan oleh Pemda setempat dan di teruskan ke Bupati melalui Dinas Pariwisata. Dengan demikian, terlihat adanya hierarki kebijakan yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Pemda, Bupati, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam proses pengelolaan desa wisata. Hal ini serupa juga sama dengan pernyataan Asrul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan SK Desa Wisata atas usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan pada pernyataannya bahwa

Desa wisata itu sebenarnya di bawah naungan dinas kebudayaan pariwisata dan badan penetapannya itu mereka yang menetapkan pengelolaan terkait desa wisata itu kalau di dinas pemberdayaan lebih kepada yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDES, keluar lah SK dari Bupati (wawancara, 29 April 2024).

Dengan demikian, struktur birokrasi yang ideal dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan adalah struktur birokrasi yang memiliki hierarki kebijakan jelas, peran pemerintah jelas, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan keterkaitan antara instansi dalam pengelolaan Desa Wisata Kabupaten Bintan.

b. Sikap atau Disposisi Pelaksana

Dalam konteks pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan, sikap atau disposisi pelaksana sangat penting karena desa wisata tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu,

para pelaksana harus memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi dalam mengelola desa wisata sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas, namun juga memerlukan sikap dan disposisi yang positif dari para pelaksana. Sikap atau disposisi pelaksana dalam pengelolaan desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang atau tim dalam menangani kegiatan pengelolaan desa wisata. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat pengetahuan pada pengelolaan desa wisata dalam implementasi kebijakannya sangat mengerti akan kondisi Desa Wisata, sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan yang menyatakan bahwa

Tapi terkait untuk pengetahuan itu alhamdulillah memang pernah menjadi fasilitator desa sebagai orang yang ditunjuk pemerintah daerah pada saat itu kami juga di berikan honor ketika itu jadi kita paham terkait desa wisata, polarisasi desa wisata, dan apa saja yang harus kita programkan dalam desa wisata ini yang ada di kabupaten bintan (Wawancara, 29 April 2024)”

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa sikap dan disposisi pelaksana peran masyarakat di luar dari birokrasi mengambil langkah partisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata Kabupaten Bintan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membiarkan birokrasi untuk mengatur dan mengelola desa wisata, namun juga berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Hal ini sependapat dengan kelompok masyarakat dari anggota Karang Taruna, Dina Aulia menerangkan bahwa

Sudah terjalin cukup baik di mana kami antar desa sudah sering melakukan pertemuan dan juga sudah sering melakukan kerja sama kami juga melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di desa kami ini dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya, mendorong informasi dan juga bertukar pengetahuan antar desa wisata (wawancara, 29 April 2024).

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata, masyarakat di luar birokrasi seperti pengusaha, pedagang, petani, dan masyarakat umum lainnya dapat berperan aktif dalam pengembangan desa wisata serta berbagi informasi dalam mengelola sumber daya. Mereka dapat berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, promosi, dan pelayanan kepada wisatawan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat di luar birokrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan desa wisata. Mereka dapat memberikan kontribusi pada ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, serta meningkatkan pemasukan lokal melalui pendapatan dari sektor pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di luar birokrasi dalam pengelolaan desa wisata Kabupaten Bintan, perlu dilakukan upaya-upaya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan bimbingan, serta pengembangan struktur organisasi yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di luar birokrasi dapat menjadi bagian integral dari proses pengelolaan desa wisata Kabupaten Bintan. Dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan, memiliki sikap atau disposisi pelaksana yang tepat sangat penting.

c. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu komponen penting dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Sumber daya dapat didefinisikan sebagai segala macam bahan, sifat, dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, organisasi, dan pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran desa wisata. Dalam pengelolaan desa wisata, sumber daya ini berfungsi sebagai pendukung utama dalam mengembangkan

potensi desa wisata yang berkelanjutan yang harus ada di dalam pengembangan potensinya. Di Kabupaten Bintan, sumber daya yang dimiliki oleh desa wisata tersebut antara lain adalah alam, budaya, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Alam sebagai salah satu sumber daya yang paling penting dalam desa wisata Bintan karena memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, seperti pantai, gugusan karang, dan hutan Mangrove. Budaya sebagai sumber daya yang berisi nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat, seperti festival, upacara adat, dan budaya lokal. Hal ini di sampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Santi Rosalinda penuturannya pada sumber daya alam yang menyatakan bahwa

Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan karna dengan adanya hal yang menarik itulah wisatawan berkunjung ke tempat atau desa tersebut, kelompok organisasi tersebut harus selalu atau terus menjalankan program-program mereka untuk menjadikan desa wisata mereka yang lebih maju keterlibatan masyarakat di sini juga sangat penting untuk kemajuan desa wisata kami di sini hanya memfasilitaskan saja walaupun tidak seutuhnya (Wawancara, 29 April 2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa sumber daya alam sangat menjadi prioritas dalam program desa wisata, sebab alam sebagai salah satu sumber daya yang paling penting dalam desa wisata Bintan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, seperti pantai, gugusan karang, dan hutan Mangrove. Keunikan dan keindahan alam tersebut menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, sehingga sangat penting untuk menjalankan program-program untuk menjadikan desa wisata lebih maju dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Hal ini sependapat yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asrul, S.Sos. mempertegaskan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bintan sangat mendukung dengan melihat potensi-potensi Desa Wisata yang sudah dilaksanakan serta di perkuat contoh yang sudah ada, adapun pernyataannya bahwa:

Sejauh ini desa wisatanya bagus karna sudah terbentuk sendiri berdasarkan potensi desa masing-masing contoh di desa busung itu mempunyai gurun pasir, gurun pasir itu di kelola oleh BUMDES. Selanjutnya desa wisata ekang secara investasinya pengusaha yang membentuk desa wisata ekang itu desa wisata ekang itu mengajak desa untuk bekerja sama untuk mengelola desa tersebut tapi sahamnya lebih besar pengelolanya di bandingkan desanya karna pemilik modal yang membangun desa wisata ekang itu (wawancara, 29 April 2024).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut bahwa potensi desa wisata di Kabupaten sudah terbentuk dengan dukungan kekayaan alam sehingga memberikan dampak ekonomi lokal, sebab hal ini dapat dilihat dari contoh desa wisata Busung yang memiliki gurun pasir yang dikelola oleh BUMDES, dan desa wisata Ekang yang mengajak desa untuk bekerja sama dalam mengelola desa tersebut.

Namun berbeda dengan sumber daya manusia, informan menyatakan bahwa tidak semua masyarakat ingin berpartisipasi secara ikhlas dalam membentuk Desa Wisata kalau tidak ada fasilitas yang mendukung berupa ketersediaan anggaran atau pun fasilitas fisik, hal ini disampaikan oleh Dato' Mustafa Abbas menyatakan

Yang mendominasi kendala itu sendiri dari yang kita lihat adalah sumber daya manusianya karna tidak semua masyarakat kita ini yang ikhlas hati berpartisipasi apalagi kalau tidak ada finansial yang di dapat atau keuntungan yang di dapat, orang tidak mungkin hari ini ingin berpanas-panaskan, meluangkan waktu tanpa mendapatkan sesuatu apalagi masyarakat yang mata pencaharian rata-rata serabutan itulah harapan mereka makanya pelatihan itu memang harus yang

diutamakan dulu ketika yang profesinya mereka sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, pendamping-pendamping desa ini dicari yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap bukan yang tidak punya pekerjaan itu agak sulit memang mereka juga harus mencari nafkah disitu, makanya kendalanya pada posisi yang bapak bilang itu tadi karna masalah keuangan dan pembinaan-pembinaan memang tidak optimal baik dari pemerintah desa sendiri maupun kecamatan, maupun pemerintah kabupaten kota (Wawancara, 29 April 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat berbeda, Perbedaan ini disebabkan karena masyarakat memiliki harapan yang berbeda, yaitu mereka ingin mendapatkan keuntungan atau finansial yang lebih baik dari aktivitas Desa Wisata. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka dari pada itu, peneliti melakukan hasil analisa lapangan pada kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya alam sehingga dalam implementasi kebijakan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Berikut adalah tabel perbandingan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang diperlukan dalam pengelolaan desa wisata:

Tabel 3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Desa Wisata

No	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Alam	Relevansi
1.	Petugas Desa Wisata	Fasilitas infrastruktur (jalan, jembatan, tempat parkir)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk menerima dan menampung wisatawan
2.	Pemandu Wisata	Fasilitas hiburan dan rekreasi (kolam renang, taman bermain, restoran)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan
3.	Petugas Pemasaran	Fasilitas pendidikan dan pelatihan (pusat pelatihan, kantor)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi desa wisata
4.	Bagian Pelayanan	Fasilitas lingkungan potensi wisata (hutan, pantai)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan
5.	Bendahara Keuangan	Sumber daya alam yang dikelola secara lestari (hutan, perairan, lahan pertanian)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan desa wisata
6.	Operasional	Fasilitas akomodasi (Hotel, Villa, Homestay)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi dan fasilitas bagi wisatawan

No	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Alam	Relevansi
7.	Pengawasan	Fasilitas komunikasi dan informasi (internet, radio, telepon)	Kedua-duanya dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dengan wisatawan

Sumber: Analisa Peneliti, 2024

Dalam pengelolaan desa wisata, sumber daya manusia dan sumber daya alam berperan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. Sumber daya manusia seperti petugas desa wisata, pemandu wisata, petugas pemasaran, petugas pelayanan, petugas keuangan, petugas operasional, dan petugas pengawasan dibutuhkan untuk mengelola desa wisata dengan baik dan efektif.

Sementara itu, sumber daya alam seperti infrastruktur, fasilitas hiburan dan rekreasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas lingkungan, sumber daya alam yang dikelola secara lestari, fasilitas akomodasi, dan fasilitas komunikasi dan informasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan wisatawan. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi dan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengelolaan desa wisata agar dapat meningkatkan pendapatan desa wisata Kabupaten Bintan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan.

d. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Dalam pengelolaan desa wisata, komunikasi menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan desa wisata. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Dalam pengelolaan desa wisata, komunikasi perlu dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, pengusaha, dan turis. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin, rapat, dan diskusi. Dalam komunikasi ini, pihak-pihak yang terlibat harus dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien, serta dapat menyebarkan informasi yang akurat dan jelas. Dalam pengelolaan desa wisata, komunikasi perlu dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dan sasaran pengelolaan desa wisata, meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, komunitas masyarakat setempat harus dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien untuk menunjang keberhasilan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan.

Informan penelitian menyatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dalam hubungan antar kelembagaan sangat baik dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Informan Asrul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan menyatakan bahwa

Sudah cukup baik komunikasi kalau dari desa hanya dari sektor pariwisata ada hal-hal yang tidak bisa kami campuri contohnya seperti kelompok sadar wisata, kelompok sadar wisata itu adanya di desa wisata itu di bawah binaan dinas pariwisata kami tidak bisa mengurus kelompok sadar wisata yang ada di desa ini karna beda turis nya (Wawancara, 29 April 2024).

Namun berbeda yang disampaikan oleh Kepala Desa E kang Anculai yang menyatakan komunikasi pada bahasa dalam pengelolaan Desa Wisata terfokus pada manajemen antara wisatawan pada program Desa Wisata. Informan Zaili Adi menyatakan

Kita juga ada program ingin menjadikan desa ekang anculai ini sebagai Kampung Inggris tapi itu belum terlaksana kita sedang coba untuk memformulasikan itu pertama kita akan memberikan kursus-kursus gratis kepada anak-anak yang masih sekolah lalu harapan kita juga ini menarik perhatian masyarakat secara umum untuk mengikuti program tersebut, ketika bahasa inggris yang di mana itu juga merupakan salah satu bahasa internasional yang menjadi alat komunikasi antar bangsa sehingga kita akan bisa beradaptasi nanti dengan turis-turis datang ke desa ketika sehingga itu akan membuat ketertarikan turi yang akan datang ke ekang anculai dan kita yakin dan percaya dari mulut ke mulut itu akan bisa menjadi bentuk promosi (Wawancara, 29 April 2024).

Dalam analisis ini, dapat disimpulkan meskipun berbeda sudut pandang informan bahwa komunikasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Informan penelitian menyatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dalam hubungan antar kelembagaan sangat baik dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Namun berbeda dengan komunikasi yang terfokus pada manajemen antara wisatawan pada program Desa Wisata juga sangat penting.

Komunikasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kualitas layanan di desa wisata. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa. Selanjutnya berdasarkan analisa peneliti, berikut ini merupakan tabel perbedaan tentang Komunikasi antar pemangku kepentingan Desa Wisata dan Komunikasi dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan.

Tabel 4. Perbandingan Komunikasi Pemangku Kepentingan Desa Wisata dan Komunikasi Pengelolaan Desa Wisata

No	Komponen	Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Desa Wisata	Komunikasi dalam Pengelolaan Desa Wisata
1.	Tujuan	Menggabungkan kepentingan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan desa wisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengunjung desa wisata, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan
2.	Aktor	Aktor yang terlibat: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait	Aktor yang terlibat: pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait
3.	Struktur	Struktur komunikasi yang dinamis dan fleksibel, dengan jalur komunikasi yang tidak teratur	Struktur komunikasi yang lebih formal dan terstruktur, dengan jalur komunikasi yang jelas dan tertentu

No	Komponen	Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan Desa Wisata	Komunikasi dalam Pengelolaan Desa Wisata
4.	Konten	Informasi yang dibutuhkan: kebutuhan masyarakat, potensi desa wisata, dan kebijakan pemerintah	Informasi yang dibutuhkan: informasi tentang destinasi wisata, harga tiket, fasilitas, dan kebijakan pemerintah
5.	Metode	Metode komunikasi yang beragam: pertemuan, email, telepon, dan social media	Metode komunikasi yang lebih efektif: pertemuan, email, telepon, dan social media
6.	Waktu	Waktu komunikasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Waktu komunikasi yang lebih terstruktur dan jelas: pertemuan bulanan, rapat rutin, dan waktu operasional
7.	Ketepatan	Ketepatan komunikasi yang penting untuk menghindari kesalahan informasi dan kesalahpahaman	Ketepatan komunikasi yang sangat penting untuk menghindari kesalahan informasi dan kesalahpahaman tentang desa wisata
8.	Keterlibatan	Keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif dalam proses komunikasi	Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih aktif dalam proses komunikasi melalui pertemuan dan diskusi

Sumber: Analisa Peneliti, 2024

Dengan demikian, kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa komunikasi desa wisata harus dinamis, fleksibel, dan terstruktur, serta harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengunjung desa wisata, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Edward III dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan pada Struktur Birokrasi yang ideal memerlukan unsur-unsur seperti hierarki kebijakan yang jelas, peran pemerintah yang jelas, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan keterkaitan antara instansi. Sikap dan Disposisi Pelaksana pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kualitas layanan dan serta memfasilitasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi budaya di sekitar Desa Wisata. Selain itu, Sumber Daya yang terbagi sumber daya manusia dan sumber daya alam juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata, Komunikasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Dukungan dari

pemerintah pusat dan provinsi serta kesadaran dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal. Dalam masa depan, diharapkan dapat tercapai kesuksesan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. Denpasar: Universitas Udayana
- Arfandi, & Adhayanto, O. (2017). Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman : Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 104–117.
- Arifin, Z. A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan. *Jurnal Archipelago*, 2(02), 133-146
- Chin, K. Y. (1995). *Special Interest Tourism: Village Tourism In Pulau Penyangat*. Singapore: National University of Singapore.
- Dwivedi, R. & D. P. (2021). Role of Stakeholders in Project Success: Theoretical Background and Approach. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management XI*, 1, 38–49.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
- Genilloud, G., & Wegmann, A. (2000). A New Definition for the Concept of Role, and Why it Makes Sense. In *Ninth OOPSLA Workshop on Behavioral Semantics*. OOPSLA.
- Gurvantry, D., Febriansah, A., & Tampubolon, J. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 174–178.
- Irhandayaningsih, A. (2019). Strategi Pengembangan Desa Gemawang Sebagai Desa Wisata Eko Budaya. *ANUVA*, 3(3), 283–290.
- Kedang, R. N. M., & Soesilo, N. I. (2021). Sustainable tourism development strategy in Bintan Regency based on Tourism Area Life Cycle. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012138.
- Middleton, V. T. C., & Hawkins, H. (1998). *Sustainable Tourism: A Marketing Perspective*. Butterworth-Heinemann.
- Mukhirto, M., Dwijayanto, A., & Fathoni, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 23–35.
- Muzwardi, A., & Simbolon, G. (2024). SWOT and PEST analysis in tourism management in Bintan Regency. *Indonesian Tourism Journal*, 1(1), 82–92.
- Nofiyanti, F., Sulartiningrum, S., & Fitriana, R. (2018). Pelatihan peningkatan kualitas SDM bidang Pariwisata di Desa Wisata Cikolelet Serang Banten. *Jurnal SOLMA*, 7(2), 176.
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9–16.
- Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Penguatan Desa Wisata. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101–107.

- Rachman, K., Edwardlis, O., Rahmanita, M., & Ratnaningtya, H. (2021). Peran Pemangku Kepentingan Rantai Pasokan Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisata Desa Sedari. *Tourism Scientific Journal*, 7(1), 1–14.
- Raharjana, D. (2010). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 225–328.
- Rahma, P. D., & Primasworo, R. A. (2018). Strategi pengembangan desa wisata pesisir di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Teknik Kimia*, 3(1), 41–52.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah : Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–24.
- Sesotyaningtyas, M., & Manaf, A. (2015). Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 273–280.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: Perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23–35.
- Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. *Proceeding SENDI_U*.
- Widnyani, I. A. P. S. (2022). Collaborative Governance In Eco-Tourism Area Management In Kelating Traditional Village, Tabanan Regency. *International Journal of Social and Public Administration*, 2(1).
- Zebua, M. (2016). *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.